

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011;
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 1999;
- Dahlan, *Makalah Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, 2000;
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, CV.Nuansa Aulia, Medan, 2013;
- Effendi Perangin. *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Raja Grafindo Jakarta, 1994;
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis (Hukum Arbitrase)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001;
- Gunawan Widjaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001;
- G.Kartasapoetra dkk, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, 1985;
- Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Laks Bang PRESS indo, Yogyakarta, 2010;
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2004;
- Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2009;
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006;
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1994;
- Limbong Bernard, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012;

- M. Suasthawa. D, *Status dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA*, CV. Kayumas Agung, Denpasar, 1987;
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung Citra Aditya Bakti, Jakarta 2000;
- Maria S.W Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas, Jakarta 2008;
- Muhsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008;
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012;
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990;
- R.Holsti dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta, 1986
- Riduan Syahrani, *Ramuan Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung. 1999;
- Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta, 2005;
- Soni Harsono, *Kegunaan Sertifikat dan Permasalahannya*, Seminar nasional, Yogyakarta, 1992;
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001;
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985;
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Palu, 2006;
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985;
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011;

Taqwaddin, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010;

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi, 2016;

## **B. Ketentuan Perundang-Undangan**

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 B ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kepemilikan Tanah Desa

## **C. Sumber Lain**

Agnes Wynona, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Jurnal Beraja Niti, Vol. 2 No.8, 2013;

Adi Sulistiyono, *Budaya Musyawarah untuk Penyelesaian Sengketa Win-win Solution dalam Perspektif hukum*, Jurnal hukum Bisnis, Vol. 25 No.1, 2006;

Bali Tours Club, *Definisi Banjar* <https://www.balitoursclub.net/banjar-di-bali/> diakses pada tanggal 9 September 2019;

Busro Muqoddas, *Penerapan Hukum Tidak Tertulis dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum No. 5 Vol. 3 1966;

Dewi, A. A. I. A. A, *Dasar Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam Memberikan Standar Pelayanan Bagi Perempuan dan*

*Anak Korban Kekerasan*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 4 (3), 2015;

Handoko Probo Setiawan, *Alih Fungsi (Konversi) Lahan Pertanian ke Non Pertanian Kasus di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda*. Ejurnal SosiatriSosiologi, Volume 4, 2016;

Heri Wibowo, *Hukum Tanah (Adat)* <http://bowolampard8.blogspot.com/2011/12/hukum-tanah-adat.html> di unduh pada hari Minggu tanggal 20 April 2019;

Hukum Online, *Definisi Teori Receptio A Contrario* dalam [m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5add48d9a8a43/arti-teori-receptio-I](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5add48d9a8a43/arti-teori-receptio-I) Di Kutip pada Tanggal 22 Juni 2019;

H. Priyatna Abdurrasyid, *Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasional) di luar Pengadilan*, Makalah, September 1996;

I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari dan I Ketut Kasta Arya Wijaya, *Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah)*, Wicaksana- Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Vol. 1 No. 1, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana/article/download/279/215> Juni 2017;

I Nyoman Sirtha, *Pengkajian Hukum Adat Bali: Inventarisasi dan Identifikasi Karakteristik Hukum Tanah Adat Bali*, Laporan Penelitian, Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2001;

Kadek ayu ratna budiarti "Strategi Pengembangan Subak Menjadi Lembaga Berorientasi Agribisnis di Kabupaten Badung" E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata, Vol. 5, No. 4, Oktober 2016

Natalia Runtuwene, *Pemberian Ganti Rugi terhadap Penguasaan Tanah tanpa Hak*, Jurnal Lex Privantum, Vol. 2, No. 3, Agustus 2014;

Pengertian Menurut Para Ahli, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-agraris/>, diakses pada hari Minggu tanggal 6 oktober 2019;

Purnamasari, Irma Devita. *Panduan Hukum Praktis Populer, Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak dalam Memahami Hukum Pertanahan*, Kaifa, 2010); <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt537ac3b737835/cara-penyertifikatan-tanah-adat/>

Ratna Artha Windari, Dilema Hukum Penyertiikatan Tanah *Ayahan* Desa di Bali (Studi Kasus Konlik Adat Tanah *Ayahan* Desa di Desa Adat Panglipuran), Jurnal IKA Vol 8, No 2, 2010;

S. Hendriatiningsih, A. Budiarta, Andri Hernandi, *masyarakat dan tanah adat di bali*, Jurnal Sosioteknologi Edisi 15 Tahun 2007;

Supratman, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung*, Jurnal Ilmu Hukum Acara Perdata, Vol. 1, No. 6, Agustus 2015;

Sovia Hasanah, *Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f1654e73aad1/prosedur-pengakuan-tanah-ulayat> 2019;

Wayan P windia dan Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Swasta Nulus bekerjasama dengan Bali Shanti, Pusat Pelayanan Konsultasi Adat dan Budaya Bali LPPM Unud dan Puslit Hukum Adat LPPM Unud, 2016;

Wikipedia, *Definisi Banjar* [https://id.wikipedia.org/wiki/Banjar\\_\(Bali\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Banjar_(Bali)) diakses pada tanggal 9 September 2019;